KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tingkatkan kualitas layanan pendidikan, komisi X desak percepatan revitalisasi gedung sekolah
Tanggal : Sabtu, 17 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Tingkatkan Kualitas Layanan Pendidikan

Komisi X Desak Percepatan Revitalisasi Gedung Sekolah

Senayan mendorong revitalisasi sekolah menjadi upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. Lingkungan sekolah yang baik merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya proses belajar mengajar efektif.

ANGGOTA Komisi X DPR Eva Stevany Rataba mengatakan, revitalisasi satuan pendidikan bukan sekadar memperbaiki atau membangun gedung sekolah. Program ini merupakan investasi bagi masa depan generasi muda. Karena itu, program revitalisasi perlu dilaksanakan dengan perencanaan yang baik, sesuai ketentuan, serta mengutamakan mutu dan manfaat jangka panjang.

"Kita semua ingin anak-anak belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan layak sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal," ujar Eva di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menargetkan, sebanyak 71.744 sekolah se-Indonesia direvitalisasi pada 2026. Revitalisasi dilakukan melalui mekanisme swakelola, sehingga proses pembangunan dan perbaikan dilaksanakan langsung oleh masing-masing satuan pendidikan dengan melibatkan masyarakat setempat.

"Mereka yang mengerjakan revitalisasi untuk 71.744 (sekolah) itu sekitar 1,1 juta orang, yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara tiga sampai delapan bulan," kata Mu'ti dalam keterangan pers, beberapa waktu lalu.

Mu'ti bilang, program revitalisasi mencakup renovasi gedung sekolah, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Revitalisasi sekolah pada tahun


FOTO: DPR.GO.ID

Eva Stevany

ini diklaim melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 11.744 sekolah dengan anggaran sebesar Rp 14 triliun.

"Pemerintah telah berkomitmen menambah sasaran sebanyak 60 ribu satuan pendidikan, sehingga total revitalisasinya mencapai 71.744," kata Mu'ti.

Eva melanjutkan, komitmen dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam program revitalisasi sekolah sangat penting. Mulai dari kepala sekolah, Komite Sekolah, panitia pembangunan satuan pendidikan, hingga unsur Pemerintah Daerah (Pemda).

Pengelolaan program, lanjutnya, perlu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis yang berlaku. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan anggaran, hingga pelaporan, perlu dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pelaksanaannya harus sesuai aturan, kualitas pekerjaannya dijaga, dan hasilnya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dalam jangka panjang. "Sehingga program revitalisasi ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi sekolah," harap politisi Nasdem ini.

Eva menegaskan, pengawalan program pendidikan tersebut sangat penting agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. "Jadi dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan layanan pendidikan yang lebih baik," harap legislator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) itu.

Anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi menambahkan, berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dari sekitar 460 ribu satuan pendidikan yang mengalami kerusakan di Indonesia, sebanyak 398 ribu telah mendapatkan alokasi program revitalisasi pada 2026.

Namun, kondisi yang ditemukan di Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) memperlihatkan percepatan program tersebut masih perlu dibarengi dengan pendataan yang akurat serta penentuan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan bangunan. "Percepatan yang disampaikan kementerian ternyata tidak sepenuhnya seperti yang ada di lapangan," tandas Purnamasidi dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026). ■ TIF